

PEMBERDAYAAN SATUAN KEWILAYAHAN DALAM MENGANTISIPASI RADIKALISME DAN SEPARATISME DALAM RANGKA MENJAGA KEAMANAN NASIONAL INDONESIA (Studi Kasus Kodam Iskandar Muda / IM)

Agung Ika Jaya¹, Lukman Munawar Fauzi², Mochamad Nanang Nazmudin³

¹Strategi Operasi Darat, Sekolah Staf dan Komando TNI AD Bandung, Indonesia

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi, Indonesia Strategi Operasi Darat, Sekolah Staf dan Komando TNI AD Bandung, Indonesia

Corresponding author: Agung Ika Jaya

Email: agungikajaya4@gmail.com; lukmanulhakim.unjani@gmail.ac.id; nanangnazmudin95@gmail.ac.id

Abstract

Indonesia has been a place of conflict due to its multicultural structure and diversity of ethnicities, religions, customs and more. Indonesia has had to face major problems, such as intra-state conflicts. The threat of state disintegration began to appear as a result of these conflicts. One form of conflict that has occurred is the Aceh conflict. To anticipate social conflicts using a local wisdom approach, soldiers of the Iskandar Muda Military Region Command (Kodam IM), a regional unit under the command of the Army Headquarters (Mabesad), are required to understand the culture and customs of the Acehnese people. They are also required to prevent the spread of separatism, which could threaten national security. In this research, the author use Role Theory, because this theory is considered relevant to examine the issues raised. In addition, researchers will also use the concepts of Radicalism, Separatism, and National Security. The research method used by researchers is a qualitative approach and analytical descriptive research type. This research aims to know examine and understand the social processes centered on and efforts of Kodam IM in anticipating radicalism and separatism in Aceh in order to maintain Indonesia's national security. In the face of increasingly complex non-military threats, strengthening the role of Regional Units (SATWIL) as a non-military instrument of national defense is a strategic necessity. With cross-sector synergy and continuous capacity building, Satwil can continue to serve as a crucial pillar in safeguarding the integrity and sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI).

Keywords: National Security, Radicalism, Separatism

Abstrak

Indonesia pernah menjadi tempat konflik karena strukturnya yang multikultural dan memiliki keanekaragaman suku, agama, adat istiadat, dan lainnya. Indonesia harus menghadapi masalah besar, seperti konflik intra negara. Ancaman disintergrasi negara mulai terlihat sebagai hasil dari konflik- konflik ini. Salah satu bentuk konflik yang pernah terjadi adalah konflik Aceh. Untuk mengantisipasi konflik sosial dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal, maka para prajurit Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Kodam IM), sebuah satuan kewilayahan yang berada di bawah komando Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), diharuskan untuk memahami budaya dan adat istiadat masyarakat Aceh. Mereka juga diharuskan untuk mencegah penyebaran paham separatisme, yang dapat mengancam ketahanan nasional. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori Peran, karena teori ini dianggap relevan untuk mengkaji masalah yang diangkat. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan Konsep Radikalisme, separatisme, dan keamanan nasional. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif dan tipe penelitian deskriptif analitik. Penelitian ini bertujuan mengetahui mengkaji serta memahami proses sosial yang berpusat pada serta upaya Kodam IM dalam mengantisipasi radikalisme dan separatisme di Aceh dalam rangka menjaga keamanan nasional Indonesia. Dalam menghadapi dinamika ancaman non-militer yang semakin kompleks, penguatan peran Satuan Kewilayahan sebagai instrumen pertahanan negara non-militer menjadi kebutuhan strategis. Dengan sinergi lintas sektor dan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan, Satwil dapat terus berperan sebagai pilar penting dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.

Kata Kunci: Keamanan Nasional, Radikalisme, Separatisme

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan budaya, suku, dan agama yang beragam, memiliki kerentanan tersendiri terhadap ancaman disintegrasi bangsa. Ancaman tersebut dapat berupa radikalisme yang mengatasnamakan agama dan separatisme yang menginginkan pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi semakin mempermudah penyebaran ideologi-ideologi ekstrem yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi ini menuntut kewaspadaan dan upaya proaktif dari berbagai pihak, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Aceh, sebagai salah satu provinsi di Indonesia, memiliki sejarah panjang dalam menghadapi ancaman radikalisme dan separatisme. Pasca konflik berkepanjangan, potensi munculnya kembali gerakan-gerakan yang ingin memecah belah NKRI masih menjadi perhatian serius. Kodam Iskandar Muda (Kodam IM), sebagai satuan kewilayahan TNI AD di Aceh, memegang peranan penting dalam mengantisipasi dan menanggulangi ancaman tersebut. Keberadaan Kodam IM tidak hanya sebatas menjaga keamanan dan kedaulatan negara, tetapi juga turut serta dalam membina ketahanan masyarakat dalam menghadapi ideologi-ideologi radikal dan separatis.

Urgensi penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlunya memahami secara mendalam peran Kodam IM dalam menghadapi dinamika radikalisme dan separatisme di Aceh. Penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai strategi dan upaya yang dilakukan oleh Kodam IM dalam mengantisipasi ancaman tersebut. Pemahaman ini krusial untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam menjaga keamanan nasional, khususnya di wilayah Aceh.

Dalam konteks penelitian ini, Kodam IM memiliki peran ganda. Pertama, sebagai kekuatan pertahanan negara, Kodam IM berperan dalam mengamankan wilayah dari ancaman eksternal maupun internal, termasuk ancaman radikalisme dan separatisme. Kedua, Kodam IM juga berperan dalam pembinaan teritorial, yaitu upaya untuk meningkatkan kesadaran bela negara, nasionalisme, dan ketahanan masyarakat terhadap ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Penelitian ini berlandaskan pada teori keamanan nasional yang menekankan pentingnya mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Teori ini mencakup aspek militer,

politik, ekonomi, sosial, budaya, dan informasi. Dalam hal ini, Kodam IM berperan dalam aspek militer dan sosial budaya dengan melaksanakan operasi militer selain perang (OMSP) yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menciptakan stabilitas keamanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas peran TNI dalam menanggulangi radikalisme dan separatisme. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2019) yang mengkaji implementasi komunikasi sosial Kodim 0204/DS dalam mencegah radikalisme di Deli Serdang menunjukkan bahwa TNI dapat berperan aktif dalam mencegah penyebaran radikalisme melalui kegiatan komunikasi sosial dengan masyarakat. Penelitian lain oleh Uchaimid Biridlo'i Robby dan Dedi Akhiruddin (2021) tentang strategi Kodim 1703/Manokwari dalam penanganan konflik sosial di Papua Barat menunjukkan pentingnya pendekatan humanis dan dialogis dalam menyelesaikan konflik sosial yang berpotensi mengancam keutuhan NKRI. Namun, penelitian tersebut belum secara khusus meneliti peran Kodam IM dalam menghadapi radikalisme dan separatisme di Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan strategi dan kebijakan dalam penanganan radikalisme dan separatisme, khususnya di wilayah Aceh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami peran Kodam IM dalam mengantisipasi radikalisme dan separatisme di Aceh dalam rangka menjaga keamanan nasional Indonesia. Fokus penelitian adalah pada identifikasi peran Kodam IM, baik dalam aspek operasional, koordinasi, komunikasi, maupun pemberdayaan masyarakat. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi yang akurat dan mendalam mengenai upaya Kodam IM dalam menjaga keamanan dan keutuhan NKRI di Aceh. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi dan kebijakan dalam penanganan radikalisme dan separatisme, tidak hanya di Aceh, tetapi juga di Indonesia secara keseluruhan.

Method

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan tipe deskriptif analitis. Pilihan ini didasari oleh tujuan penelitian, yaitu untuk menggali dan memahami secara mendalam peran dan upaya Kodam Iskandar Muda (Kodam IM) dalam mengantisipasi radikalisme dan separatisme di Aceh. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menjelajahi fenomena yang kompleks ini secara holistik, memperhatikan konteks sosial, dan mengungkapkan makna di balik tindakan dan peristiwa.

Tipe deskriptif analitis digunakan karena penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi yang ada, tetapi juga untuk menganalisis dan menginterpretasikan data secara mendalam. Fokusnya adalah pada deskripsi dan analisis terhadap kondisi yang ada, serta upaya yang dilakukan oleh Kodam IM dalam menghadapi ancaman radikalisme dan separatisme, baik dalam aspek operasional, koordinasi, komunikasi, maupun pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di Kodam IM, Banda Aceh, selama periode Mei hingga November 2024. Pemilihan lokasi ini didasari oleh pertimbangan bahwa Kodam IM merupakan satuan kewilayahan TNI AD yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan keutuhan NKRI di Aceh. Provinsi ini memiliki sejarah panjang dalam menghadapi ancaman radikalisme dan separatisme, sehingga menjadi konteks yang relevan untuk meneliti peran TNI dalam mengantisipasi ancaman tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengamati kegiatan Kodam IM dalam mengantisipasi radikalisme dan separatisme. Observasi ini meliputi pengamatan terhadap kegiatan operasional, latihan, sosialisasi, dan interaksi Kodam IM dengan masyarakat.

Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci yang dipilih secara purposive. Informan tersebut adalah individu-individu yang dianggap memiliki pengetahuan dan informasi yang relevan dengan fokus penelitian, seperti Dandeninteldam IM, Pabandya Lid Sinteldam IM, dan Kasubbag Hukum dan Komunikasi Publik Sekretariat MPU Aceh. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai strategi, upaya, dan tantangan yang dihadapi oleh Kodam IM dalam mengantisipasi radikalisme dan separatisme.

Peneliti melakukan wawancara mendalam (in-depth Interview) yang bertujuan untuk memperjelas dan memperkuat data yang diperoleh di lapangan. Keseluruhan informan tersebut dipilih dengan menggunakan teknik purposive karena teknik ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Kriteria dari informan yang dipilih yaitu memiliki kriteria yang berdasarkan ketentuan yang telah peneliti tentukan untuk kemudian dipertimbangkan oleh peneliti, sesuai dengan keterkaitan mereka dengan penelitian ini. Data-data dalam penelitian dikumpulkan melalui beberapa metode diantaranya wawancara dengan informan penelitian, observasi langsung di lapangan dan studi kepustakaan yang terkait dengan penelitian yang telah

dilaksanakan.

Dokumentasi berupa dokumen-dokumen resmi, foto-foto kegiatan, dan data-data pendukung lainnya dikumpulkan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa rencana strategis, laporan kegiatan, pedoman, dan peraturan yang berkaitan dengan upaya Kodam IM dalam mengantisipasi radikalisme dan separatisme.

Studi kepustakaan dilakukan dengan meneliti dan mempelajari literatur ilmiah yang relevan, seperti buku, artikel, jurnal, dan dokumen resmi. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh landasan teori, konsep, dan informasi yang mendukung analisis data. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengorganisasi data mentah menjadi informasi yang bermakna. Penyajian data disajikan dalam bentuk naratif yang sistematis, jelas, dan mudah dipahami. Kesimpulan ditarik berdasarkan hasil analisis data dan interpretasi peneliti terhadap fenomena yang diteliti. Kesimpulan ini merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian dan berisi temuan-temuan penting yang diperoleh selama proses penelitian. Untuk memastikan keabsahan data, dilakukan triangulasi data dengan membandingkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Triangulasi data ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Peran Strategis Satuan Kewilayahan

Satuan Kewilayahan memiliki peran utama sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan mengantisipasi potensi ancaman radikalisme dan separatisme di wilayah. Melalui jaringan teritorial hingga tingkat desa, Satwil mampu melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap dinamika sosial yang berpotensi mengarah pada berkembangnya ideologi radikal dan gerakan separatis. Babinsa sebagai ujung tombak satuan teritorial berperan penting dalam memantau kondisi sosial masyarakat, membangun komunikasi intensif dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, serta menyampaikan informasi secara berjenjang kepada komando atas.

Selain itu, Satwil Kodam Iskandar Muda menjalankan fungsi pembinaan teritorial melalui kegiatan komunikasi sosial, pembinaan kesadaran bela negara, serta penguatan nilai-nilai Pancasila dan NKRI. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek keamanan, bukan

sekadar objek pengamanan, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara TNI dan masyarakat.

Pemberdayaan Satwil Kodam Iskandar Muda dilakukan melalui beberapa aspek utama. Pertama, pemberdayaan personel, khususnya Babinsa, melalui peningkatan kapasitas pemahaman ideologi, sosial budaya Aceh, serta kemampuan komunikasi persuasif. Hal ini penting agar aparat teritorial mampu menjalankan tugas secara adaptif dan sensitif terhadap karakteristik lokal masyarakat Aceh.

Kedua, pemberdayaan wilayah dengan mengoptimalkan potensi kearifan lokal, seperti peran ulama, lembaga adat, dan institusi keagamaan. Pendekatan ini memperkuat ketahanan masyarakat terhadap penetrasi ideologi radikal dan narasi separatis. Ketiga, pemberdayaan sistem dan metode, yaitu dengan mengedepankan operasi teritorial non-kinetik yang terintegrasi dengan pemerintah daerah, Polri, dan instansi terkait lainnya dalam kerangka *whole of government approach*.

Pemberdayaan Satwil Kodam Iskandar Muda memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah Aceh dan mendukung keamanan nasional secara keseluruhan. Kehadiran Satwil secara berkelanjutan mampu menekan ruang gerak kelompok radikal dan separatis, mencegah proses rekrutmen dan indoktrinasi masyarakat, serta memperkuat loyalitas masyarakat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendekatan teritorial yang humanis dan partisipatif juga membantu menjaga keberlanjutan perdamaian pasca konflik di Aceh.

Peran Kodam IM Dalam Mengantisipasi Radikalisme Dan Separatisme Dalam Rangka Menjaga Keamanan Nasional

Peran Kodam IM dalam mengantisipasi radikalisme dan separatisme di Aceh dalam rangka menjaga keamanan nasional sangat penting dan strategis. Kodam IM, melalui berbagai satuan dan staf intelijennya, telah berperan aktif dalam menjalankan operasi intelijen, penggalangan, dan patroli keamanan guna mendeteksi serta mencegah penyebaran paham radikal dan tindakan separatisme.

Melalui jaringan teritorial yang menjangkau hingga tingkat desa, Babinsa sebagai ujung tombak Satwil berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memantau dinamika sosial secara berkelanjutan. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat memungkinkan identifikasi awal terhadap indikasi penyebaran ideologi radikal atau aktivitas yang mengarah pada separatisme.

Deteksi dini ini menjadi elemen penting dalam sistem peringatan dini keamanan nasional, karena memungkinkan negara untuk mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum ancaman berkembang menjadi konflik terbuka. Dalam konteks Aceh, pendekatan ini sangat relevan mengingat sensitivitas sosial dan sejarah konflik yang masih membekas dalam memori kolektif masyarakat.

Kodam IM juga melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan berbagai pihak, termasuk institusi pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, dan tokoh-tokoh penting di Aceh. Upaya ini terbukti cukup efektif dalam menekan perkembangan radikalisme dan separatisme, yang ditandai dengan menurunnya aktivitas kelompok-kelompok tersebut serta merosotnya dukungan masyarakat terhadap ideologi dan partai politik yang terkait dengan separatisme.

Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam hal memperkuat deteksi dini dan respon cepat terhadap ancaman yang berkembang. Untuk itu, disarankan agar Kodam IM terus memperkuat operasi intelijen dan menjaga sinergi dengan semua pihak terkait, guna memastikan stabilitas keamanan di Aceh dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upaya Kodam IM Dalam Mengantisipasi Radikalisme dan Separatisme dalam Rangka Menjaga Keamanan Nasional

Upaya-upaya tersebut mencakup deteksi dini terhadap potensi ancaman, netralisasi tokoh-tokoh yang dianggap berisiko, serta pencegahan terhadap penyebaran ideologi radikal dan separatis. Hasilnya, terdapat penurunan signifikan dalam aktivitas kelompok radikal dan separatis, serta melemahnya dukungan masyarakat terhadap ideologi yang bertentangan dengan prinsip NKRI. Namun, untuk terus menjaga keberhasilan ini, Kodam IM perlu terus meningkatkan intensitas dan cakupan operasi intelijen serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dengan demikian, upaya untuk mengantisipasi radikalisme dan separatisme dapat berjalan secara berkelanjutan dan semakin efektif dalam menjaga keamanan nasional.

Kodam IM telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengantisipasi radikalisme dan separatisme melalui berbagai upaya proaktif. Upaya-upaya tersebut tidak hanya terbatas pada operasi militer, tetapi juga mencakup pendekatan non-militer yang lebih menekankan pada pencegahan dan pembinaan.

1. Operasi Intelijen.

Kodam IM, melalui satuan intelijennya, melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman radikalisme dan separatisme. Hal ini dilakukan dengan memantau pergerakan individu atau kelompok yang dicurigai, mengidentifikasi pola penyebaran ideologi radikal, dan menganalisis faktor-faktor yang dapat memicu munculnya gerakan separatis, kemudian juga, selain itu juga melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang dianggap rawan terhadap penyebaran radikalisme dan separatisme. Pemetaan ini didasarkan pada berbagai faktor, seperti sejarah konflik, kondisi sosial ekonomi, dan pengaruh kelompok radikal. Kemudian juga Kodam IM membangun dan mengembangkan jaringan informasi yang kuat dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan akademisi. Jaringan informasi ini berperan penting dalam mengumpulkan data dan informasi mengenai aktivitas kelompok radikal dan separatis. Informasi yang terkumpul dari berbagai sumber dianalisis secara komprehensif untuk memperoleh gambaran yang akurat tentang potensi ancaman, modus operandi, dan jaringan kelompok radikal dan separatis.

2. Kegiatan Penggalangan

Kegiatan penggalangan yang dilakukan oleh Kodam IM lebih menekankan pada pendekatan persuasif dan humanis. Melalui komunikasi sosial yang intensif, Kodam IM berupaya membangun kesadaran dan ketahanan masyarakat terhadap ideologi-ideologi radikal dan separatis. Kodam IM secara aktif melakukan komunikasi sosial dengan berbagai lapisan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian, toleransi, dan persatuan, serta menangkal pengaruh ideologi radikal dan separatis, kemudian juga Kodam IM memberdayakan komunitas lokal melalui pelatihan keterampilan, penyuluhan kesehatan, dan bantuan sosial. Program-program pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kerentanan terhadap pengaruh radikalisme dan separatisme, selanjutnya juga Kodam IM menjalin hubungan yang erat dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian, toleransi, dan persatuan. Para tokoh ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk opini publik dan mengarahkan masyarakat untuk menolak radikalisme dan separatisme.

3. Koordinasi Lintas Sektor Pemerintah Daerah.

Kodam IM mendukung program-program pemerintah daerah yang berkaitan dengan pencegahan radikalisme dan separatisme, seperti program deradikalisasi, dialog antarumat beragama, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan serta berkoordinasi dengan kepolisian dan instansi keamanan lainnya untuk melakukan deteksi dini, pencegahan, dan penindakan terhadap potensi ancaman. Koordinasi ini meliputi pertukaran informasi, operasi gabungan, dan peningkatan kapasitas aparatur. Kodam IM bekerjasama dengan lembaga pendidikan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada generasi muda tentang bahaya radikalisme dan separatisme. Kerjasama ini diwujudkan dalam bentuk seminar, workshop, dan pelatihan bagi siswa, mahasiswa, dan guru. Selanjutnya Kodam IM melibatkan LSM dan Ormas dalam kegiatan-kegiatan pencegahan radikalisme dan separatisme. LSM dan Ormas memiliki jangkauan yang luas ke masyarakat dan dapat berperan sebagai mitra strategis dalam menyebarkan pesan-pesan perdamaian dan toleransi.

Dalam rangka merumuskan strategi yang efektif dalam mengantisipasi radikalisme dan separatisme, Kodam IM perlu melakukan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan program.

1. Kekuatan (*Strengths*)

Kodam IM memiliki jaringan intelijen yang tersebar luas dan terlatih dengan baik, memungkinkan deteksi dini dan respon cepat terhadap potensi ancaman. Kodam IM telah membangun kemitraan yang kuat dengan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah, aparat kepolisian, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, selanjutnya Kodam IM menikmati tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat Aceh, yang dibangun melalui pendekatan humanis dan kontribusi positif dalam pembangunan serta memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam menangani konflik di Aceh, sehingga memiliki pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial dan politik di wilayah tersebut.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Meskipun memiliki personel yang terlatih, Kodam IM terkadang menghadapi keterbatasan sumber daya, terutama dalam hal teknologi dan peralatan pendukung operasi intelijen. Kondisi geografis Aceh yang berbukit-bukit dan memiliki banyak daerah terpencil menyulitkan Kodam IM

untuk melakukan pengawasan secara optimal di seluruh wilayah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan oleh Kodam IM untuk meningkatkan efektivitas operasi intelijen dan sosialisasi pencegahan radikalisme dan separatisme. Kodam IM dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan radikalisme dan separatisme melalui program-program edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan komunitas. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menanggulangi radikalisme dan separatisme melalui berbagai kebijakan dan program. Kodam IM dapat memanfaatkan dukungan ini untuk meningkatkan efektivitas program-programnya.

3. Ancaman (*Threats*)

Radikalisme dan separatisme merupakan ancaman global yang dapat mempengaruhi Indonesia, termasuk Aceh. Perkembangan situasi internasional dan pengaruh ideologi transnasional perlu diwaspadai oleh Kodam IM. Media sosial menjadi salah satu media yang efektif bagi kelompok radikal dan separatis untuk menyebarkan propaganda dan merekrut anggota baru. Kodam IM perlu meningkatkan kemampuannya dalam melawan propaganda ini dan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan kontra-narasi. Perubahan politik lokal dan isu-isu sosial ekonomi dapat mempengaruhi stabilitas keamanan di Aceh. Kodam IM perlu memperhatikan dinamika ini dan menyesuaikan strateginya dengan kondisi yang berkembang.

Berdasarkan analisis SWOT, Kodam IM dapat menerapkan strategi agresif dengan memaksimalkan kekuatan dan memanfaatkan peluang yang ada. Beberapa strategi kunci yang dapat diimplementasikan antara lain:

1. Meningkatkan kemampuan intelijen dalam mendeteksi dini dan merespon ancaman radikalisme dan separatisme melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penguatan kerjasama dengan instansi terkait.
2. Melakukan kegiatan penggalangan yang lebih intensif dan terarah dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan. Pendekatan humanis dan persuasif perlu diprioritaskan untuk membangun kepercayaan dan mendapatkan dukungan dari masyarakat.
3. Memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat kepolisian, lembaga pendidikan, LSM, dan Ormas dalam merumuskan dan mengimplementasikan

program-program pencegahan radikalisme dan separatisme.

4. Memanfaatkan media sosial secara optimal untuk menyebarkan kontra-narasi, mempromosikan nilai-nilai kebangsaan, dan membangun citra positif TNI di mata publik.

Selain strategi-strategi di atas, Kodam IM juga perlu mengembangkan gagasan-gagasan inovatif untuk meningkatkan efektivitas program-programnya. Beberapa gagasan yang dapat dipertimbangkan antara lain:

1. Pengembangan Platform Digital untuk Kontra-Narasi. Membangun platform digital yang berisi informasi akurat dan menarik tentang bahaya radikalisme dan separatisme, serta nilai-nilai kebangsaan dan moderasi beragama. Platform ini dapat berupa website, aplikasi mobile, atau media sosial yang dikelola secara profesional.
2. Program Deradikalisasi Berbasis Komunitas. Mengembangkan program deradikalisasi yang melibatkan masyarakat secara aktif. Program ini dapat dilakukan melalui pendekatan keagamaan, psikologi, dan sosial dengan melibatkan ulama, psikolog, dan pekerja sosial.
3. Pembentukan Satgas Anti-Radikalisme dan Separatisme. Membentuk satuan tugas khusus yang berfokus pada pencegahan dan penanganan radikalisme dan separatisme. Satgas ini dapat beranggotakan personel TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya yang memiliki kompetensi di bidangnya

Pembinaan Teritorial Berbasis Kearifan Lokal dan Sinergi Lintas Sektor

Pemberdayaan Satwil Kodam Iskandar Muda juga diwujudkan melalui pembinaan teritorial yang mengedepankan kearifan lokal Aceh. Nilai-nilai adat, peran ulama, dan institusi keagamaan menjadi elemen penting dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap penetrasi ideologi radikal. Dengan melibatkan tokoh adat dan agama, Satwil mampu menyampaikan pesan-pesan kebangsaan dan bela negara secara lebih efektif dan diterima oleh masyarakat.

Pendekatan berbasis kearifan lokal ini tidak hanya memperkuat legitimasi kehadiran TNI di tengah masyarakat, tetapi juga mencegah munculnya persepsi represif yang dapat memicu resistensi sosial. Dengan demikian, pembinaan teritorial menjadi sarana untuk memperkuat kohesi sosial dan loyalitas masyarakat terhadap NKRI.

Dalam mengantisipasi radikalisme dan separatisme, Satwil Kodam Iskandar Muda tidak

bekerja secara mandiri, tetapi bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, Polri, dan instansi terkait lainnya. Sinergi ini mencerminkan pendekatan *whole of government* dalam penanganan ancaman non-militer.

Koordinasi lintas sektor memungkinkan pertukaran informasi dan penyusunan langkah-langkah strategis yang lebih komprehensif. Dalam konteks keamanan nasional, sinergi ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan serta memastikan efektivitas kebijakan pencegahan.

Kontribusi dan Tantangan terhadap Keamanan Nasional

Pemberdayaan Satuan Kewilayahan Kodam Iskandar Muda memberikan kontribusi signifikan terhadap keamanan nasional Indonesia. Melalui pendekatan preventif dan persuasif, Satwil mampu menekan ruang gerak kelompok radikal dan separatist tanpa menimbulkan eskalasi konflik. Kehadiran Satwil secara konsisten juga membantu menjaga stabilitas pasca-konflik di Aceh, yang merupakan prasyarat penting bagi pembangunan nasional.

Selain itu, penguatan ketahanan wilayah melalui pembinaan teritorial berkontribusi pada peningkatan kesadaran bela negara dan loyalitas masyarakat terhadap NKRI. Dalam jangka panjang, kondisi ini memperkuat ketahanan nasional dari ancaman ideologis yang bersifat laten dan berpotensi merusak integrasi bangsa.

Tantangan dan Dinamika Pemberdayaan Satwil.

Meskipun memiliki peran strategis, pemberdayaan Satwil Kodam Iskandar Muda menghadapi sejumlah tantangan. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan penyebaran ideologi radikal melalui media digital yang sulit dipantau secara konvensional. Selain itu, keterbatasan sumber daya personel dan luas wilayah binaan menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan teritorial secara optimal.

Tantangan lainnya adalah sensitivitas identitas lokal yang memerlukan pendekatan komunikasi yang cermat dan kontekstual. Kesalahan dalam pendekatan dapat memicu resistensi sosial dan mengurangi efektivitas pembinaan teritorial. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas personel Satwil dalam memahami dinamika sosial dan budaya lokal menjadi kebutuhan yang mendesak.

Kesimpulan

Kodam Iskandar Muda (Kodam IM)

memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan nasional di Aceh. Kodam IM secara proaktif mengantisipasi radikalisme dan separatisme melalui operasi intelijen, penggalangan, dan patroli keamanan. Koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, seperti institusi pemerintah, penegak hukum, dan organisasi masyarakat, juga menjadi kunci keberhasilan Kodam IM dalam menciptakan stabilitas keamanan di wilayah Aceh. Upaya-upaya Kodam IM tersebut terbukti efektif dalam menekan perkembangan radikalisme dan separatisme, yang ditandai dengan menurunnya aktivitas kelompok-kelompok tersebut dan merosotnya dukungan masyarakat terhadap ideologi separatist. Meskipun demikian, Kodam IM perlu terus meningkatkan deteksi dini dan respon cepat terhadap ancaman yang berkembang, serta memperkuat sinergi dengan semua pihak terkait, guna memastikan stabilitas keamanan di Aceh dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Referensi

- Bogdan, R.C., & Biklen, S.K. 1982. "Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods." Boston: Allyn and Bacon, inc.
- Bakti, A.S. (2014). *Merintis Jalan Mencegah Terorisme*. Jakarta: Semarak Lautan Warna Press
- Bandoro, B. (2005). *ASEAN dan Institusionalisasinya*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Benda, J. (1997). "Pengkhianatan Kaum Intelektual." Jakarta: Gramedia, 1997.
- Creswell, J.W. (2016). "Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed." Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cruwys, T., Haslam, S.A., Dingle, G.A., Haslam, C., & Jetten, J. (2014). "Depression and social identity: An integrative review." *Personality and Social Psychology Review*, 18 (3), 215-238.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2014). "Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat." Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dhakidae, D. (2001). "Akar Permasalahan dan Alternatif Proses penyelesaian Konflik Aceh Jakarta Papua." Jakarta: YAPPIKA.
- Doyle, D. H. (Ed.). (2010). "Secession as an international phenomenon: from America's Civil War to contemporary separatist movements (Vol. 10)." University of Georgia

- Press.
- Ishak, O.S. (2008). "Dari Maaf ke Panik Aceh: Sebuah Sketsa Sosiologi- Politik." Jakarta : Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.
- Kell, T. (1995). *The Roots of Acehnese Rebellion 1989-1992*, (New York: Cornell University Pers.
- Komariah, A., & Satori, D. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta.
- Martanto, U., Roikan, A. H., Febby, R., & Akhol, F. (2019). "Meredam Teror: Pencegahan Terorisme dan Radikalisme Berperspektif HAM." Yayasan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM).1
- Moleong, Lexy J. (2015). "Metode Penelitian Kualitatif". Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Munua, H.Y. (2021). Peran Marinir TNI AL dalam Penanganan Konflik Papua. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, 9(3), 241-262.
- Nasution, S. (1996). "Metode Research." Jakarta : Bumi Aksara.
- Nazir, Moh. (2013). "Metode Penelitian." Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurhasim, dkk. "Konflik Aceh: Analisis atas Sebab-sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian." Jakarta: LIPI.
- Pratiwi, Y. D. (2017). *Mengatasi Gerakan Separatis Melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP)*.
- Robby, U.B., & Akhiruddin, D. (2021). Strategi Kodim 1703/Manokwari Dalam Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Papua Barat. *JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 2(1), 149-158.
- Sawitri, I., Zamzami, A. (1998). *Simak dan Selamatkan Aceh*. Jakarta : PT Bina Rena Perwira.
- Siregar, R.S. (2019). Implementasi Komunikasi Sosial Kodim 0204/DS Dalam Mencegah Radikalisme di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 9(2), 61-80.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tisna, W. (2022). *Fenomena dan Perkembangan GAM Sebagai Identitas Sosial Pasca Damai (Studi Kasus di Kecamatan Seunagan Timur Nagan Raya)*. PhD Thesis. UIN Ar- Raniry.no,
- Edelman, M., & Kay, C. (2009). *Transnational*